



► DANA TKD

Belanja Pegawai 30%, Operasional Dipangkas

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memangkas sejumlah belanja operasional untuk menjaga belanja pegawai yang kini mencapai sekitar 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanpa mengurangi gaji aparatur sipil negara (ASN).

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Opsi itu dipilih untuk menghindari pemangkasan gaji maupun tunjangan aparatur sipil negara (ASN). Pemkot Jogja akan menjaga belanja pegawai tetap di bawah 30% seperti sebelum adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan pemotongan gaji ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukan menjadi opsi karena akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan pegawai.

"Kalau mengurangi gaji ASN itu tidak mungkin. PPPK tidak digaji juga tidak mungkin," tegas Hasto di Pasar Beringharjo, Jogja, Jumat (7/8).

► Pemotongan gaji ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukan menjadi opsi.

► Sebelum kebijakan berlaku, porsi belanja pegawai Kota Jogja masih berada di bawah 30%.

Menurut Hasto, kenaikan persentase belanja pegawai bukan disebabkan bertambahnya belanja gaji, melainkan menyusutnya total APBD setelah Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berimbas pada berkurangnya dana transfer ke daerah.

Sebelum kebijakan tersebut berlaku, porsi belanja pegawai Kota Jogja masih berada di bawah 30%. Namun, ketika dana transfer dari Pemerintah Pusat berkurang, total APBD ikut mengecil sehingga persentase belanja pegawai naik menjadi sekitar 30%.



Hasto Wardoyo

"Dulu Kota Jogja sebelum ada efisiensi gaji ASN itu di bawah 30%. Begitu anggaran dari pusat berkurang, pembagiannya menjadi kecil sehingga sekarang menjadi sekitar 30 persen," ujarnya.

Untuk menjaga proporsi belanja pegawai tetap sesuai ketentuan, Pemkot Jogja memilih melakukan penghematan pada sejumlah pos belanja operasional.

"Yang bisa dilakukan adalah mengencangkan ikat pinggang. Makan minum dipotong, transportasi dipotong, perjalanan dinas dipotong, kunjungan luar negeri juga dipotong," katanya.

Hasto juga mengungkapkan beban APBD bertambah setelah Pemkot Jogja harus menanggung kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 21.000 warga yang sebelumnya dibiayai Pemerintah Pusat. "BPJS kita [Pemkot Jogja] hilang dari pusat. Ada sekitar 21.000 yang harus ditanggung APBD. Itu juga membuat belanja pegawai menjadi seperti sekarang," ujarnya.

Meski demikian, Hasto mengakui apabila tekanan fiskal semakin berat, penyesuaian pada komponen tunjangan tertentu dapat dipertimbangkan. Salah satu ilustrasi yang disampaikan ialah pembayaran gaji ke-13 tanpa tambahan tunjangan kinerja (tukin), meski menurutnya langkah tersebut juga bukan keputusan yang mudah.

Menurut Hasto, peluang penghematan terbesar berada pada belanja perjalanan dinas, terutama perjalanan dinas dalam negeri yang nilainya lebih besar dibandingkan perjalanan dinas luar negeri. Adapun perjalanan dinas luar negeri akan dibatasi secara signifikan sesuai kebijakan efisiensi pemerintah.

"Perjalanan dinas luar negeri memang bisa dipangkas sampai 70%, tetapi yang nilainya paling besar justru perjalanan dinas dalam negeri, termasuk kunjungan kerja," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 September 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005